

## Pura Lingsar sebagai Destinasi Wisata Budaya antara Sakralitas dan Komersialisasi

Rizki Sumardani<sup>1</sup>, Anak Agung Ayu Ribeka Martha Purwahita<sup>2</sup>, I Wayan Kartimin<sup>3</sup>, I Made Weda Satia Negara<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bumigora, [rizki.sumardani@universitasbumigora.ac.id](mailto:rizki.sumardani@universitasbumigora.ac.id)

<sup>2</sup>Politeknik Negeri Bali, [ribekapurwa@pnb.ac.id](mailto:ribekapurwa@pnb.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Triatma Mulya, [wayan.kartimin@triatmamulya.ac.id](mailto:wayan.kartimin@triatmamulya.ac.id)

<sup>4</sup>Politeknik Nasional, [wedasatia.made@gmail.com](mailto:wedasatia.made@gmail.com)

### ABSTRAK

Pariwisata berbasis budaya terus menjadi penggerak ekonomi daerah, tetapi destinasi yang mengandung nilai kesakralan kerap berhadapan dengan dilema antara menjaga tradisi dan memenuhi tuntutan pasar wisata. Walaupun sejumlah penelitian telah menyoroti potensi gesekan antara sektor pariwisata dan ruang religius, kajian mengenai bagaimana komunitas lokal menegosiasikan batas kesakralan sembari meraih manfaat ekonomi masih relatif terbatas. Kekosongan inilah yang melatarbelakangi penelitian mengenai Pura Lingsar di Lombok, sebuah situs yang menggabungkan fungsi keagamaan dan aktivitas wisata. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana hubungan antara pariwisata dan kegiatan bisnis mempengaruhi tata kelola ruang sakral di Pura Lingsar, serta bagaimana masyarakat setempat untuk mempertahankan nilai adat dalam kondisi komersialisasi yang terus meningkat. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dipilih karena pendekatan ini untuk peneliti menggali pemaknaan, persepsi, serta praktik sosial berbagai actor mulai dari wisatawan, tokoh adat, hingga pengelola pura lingsar secara lebih mendalam dan sesuai konteks lokal. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kesakralan Pura Lingsar tetap terpelihara melalui manajemen berbasis kearifan lokal yang secara jelas memisahkan ruang inti sakral, seperti Kemaliq, yang aksesnya dibatasi, dari area luar yang boleh dimanfaatkan untuk kegiatan wisata seperti Ritual Perang Topat merupakan komodifikasi yang dikendalikan dengan cermat, di mana bagian depan situs dijadikan ruang tontonan, sementara area belakang tetap difungsikan untuk praktik esoteris tanpa keterlibatan pengunjung. Pendekatan tersebut menghasilkan hubungan saling menguntungkan antara kegiatan ekonomi pariwisata dan pelestarian budaya, sekaligus menggeser posisi komunitas dari pihak yang pasif menjadi pengelola aktif. Meski demikian, penelitian ini masih terbatas pada satu lokasi dan belum menelusuri aspek ekonomi secara kuantitatif. Oleh karena itu, studi berikutnya disarankan untuk memperluas objek kajian ke destinasi sakral lain serta memadukan metode kualitatif dan kuantitatif agar pemahaman mengenai keberlanjutan pariwisata budaya dapat diperoleh secara lebih utuh.

**Kata kunci:** budaya, pariwisata, destinasi, komersialisasi, sakralitas

### ABSTRACT

*Culture-based tourism continues to drive regional economies, but destinations with sacred values often face a dilemma between preserving traditions and meeting the demands of the tourism market. Although a number of studies have highlighted the potential for friction between the tourism sector and religious spaces, research on how local communities negotiate sacred boundaries while reaping economic benefits is still relatively limited. This gap is the background for research on Pura Lingsar in Lombok, a site that combines religious functions and tourism activities. The research focuses on how the relationship between tourism and business activities affects the management of sacred spaces at Pura Lingsar, as well as how the local community maintains traditional values in the face of increasing commercialization. This study uses a qualitative descriptive method, chosen because this approach allows researchers to explore the meanings, perceptions, and social practices of various actors, ranging from tourists and traditional leaders to the managers of Pura Lingsar, in greater depth and in accordance with the local context. The results of the study show that the sanctity of Pura Lingsar is maintained through management based on local wisdom, which clearly separates the sacred core areas, such as Kemaliq, where access is restricted, from the outer areas that can be used for tourist activities such as the Topat War Ritual. This is a carefully controlled commodification,*

*where the front of the site is used as a viewing area, while the rear area continues to be used for esoteric practices without visitor involvement. This approach has resulted in a mutually beneficial relationship between tourism economic activities and cultural preservation, while shifting the community's position from passive to active management. However, this study is still limited to one location and has not explored economic aspects quantitatively. Therefore, future studies are recommended to expand the object of study to other sacred destinations and combine qualitative and quantitative methods in order to gain a more comprehensive understanding of the sustainability of cultural tourism.*

**Keywords:** *culture, tourism, destinations, commercialization, sacredness*

*Naskah diterima: 08 September 2025, direvisi: 26 November 2025, diterbitkan: 12 Februari 2026  
DOI: <https://doi.org/10.37253/altasia.v8i1.11313>*

## **PENDAHULUAN**

Pariwisata kini telah berevolusi menjadi salah satu sektor yang paling dinamis dalam ekonomi global (Poort et al., 2021). Saat ini, pariwisata bukan hanya sebuah aset bagi sebuah negara, namun juga menciptakan lapangan kerja, menstimulasi investasi, dan meningkatkan kekayaan local (Villaverde et al., 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa selain aktivitas fisik, pariwisata juga merupakan industri reflektif yang dapat menghasilkan peningkatan signifikan terhadap ekonomi regional (Piramanayagam et al., 2020). Dalam konteks ini, tak heran apabila sektor pariwisata sering dijuluki sebagai "industri primadona", karena perannya yang krusial dalam pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan (Rasoolimanesh et al., 2022).

Kawasan yang memiliki sektor pariwisata yang maju umumnya menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi (Zhang et al., 2021). Komunitas di sekitar destinasi wisata memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi (Wei et al., 2021). Adapun usaha jasa pariwisata seperti penginapan, kuliner, dan pemandu wisata, maupun kegiatan pendukung lainnya (Tolkach & Pratt, 2021).

Peningkatan penghasilan masyarakat secara keseluruhan dapat berdampak pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan (Szromek et al., 2021). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam

mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada aspek kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kesetaraan social (Terkenli & Georgoula, 2022).

Di Indonesia, pariwisata budaya memiliki keterkaitan yang tidak bisa pisahkan dan telah memainkan peran penting sebagai salah satu jenis pariwisata yang paling cepat berkembang (Hidayati & Siregar, 2024). Keagungan budaya yang meliputi peninggalan sejarah, adat istiadat, kesenian, dan situs-situs keagamaan menjadi daya tarik tersendiri bagi domestik maupun manca negara (Matteucci et al., 2022). Keunikan budaya Indonesia yang majemuk merupakan peluang besar untuk mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal (Nurhadi, Sumarti, Hadi Dharmawan, et al., 2022). Namun demikian, pengembangan pariwisata budaya juga memerlukan pendekatan yang bijak dan bertanggung jawab (Chi & Han, 2021), sehingga nilai-nilai budaya tidak semata-mata dijadikan komoditas ekonomi, tetapi tetap dihargai sebagai identitas dan jati diri bangsa. Salah satu destinasi wisata budaya yang menjadi simbol makna budaya dan nilai toleransi adalah Pura Lingsar di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (Fitriani 2023). Pura ini menjadi tempat ibadah bagi umat Hindu dan juga umat Muslim Wetu Telu, sehingga tercipta proses harmonisasi dan akulturasi budaya yang berbeda (Rudiarta et al., 2022).

Keberadaan Pura Lingsar tidak hanya merepresentasikan nilai religius dan historis, namun juga menjadi simbol kerukunan antar umat beragama yang dapat menjadi teladan yang baik bagi pengelolaan destinasi wisata budaya lainnya (Suartana, 2022). Keunikan inilah yang menjadikan Pura Lingsar sebagai magnet bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat warisan budaya dan nilai-nilai spiritual yang hidup di tengah-tengah masyarakat Lombok (Aryawati et al., 2022).

Akan tetapi, sektor swasta yang berkembang di daerah berpenghasilan rendah seperti Pura Lingsar selalu menghadapi tantangan yang tidak dapat diatasi (Budhawati, 2022). Aktivitas keagamaan yang tidak dapat dikendalikan, komersialisasi ruang keagamaan, dan pembangunan infrastruktur pariwisata yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai lokal dapat berdampak pada situasi ini dan mengubah ruang keagamaan menjadi sumber konsumsi (Fathoni et al., 2023). Ketidakseimbangan antara aspek ekonomi dan spiritual berpotensi melemahkan struktur sosial-keagamaan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan jumlah pemeluk agama (Anom Kumbara & Sutrisno, 2024).

Interdependensi antara nilai-nilai sakral dan pertumbuhan ekonomi di sektor swasta telah menciptakan kompleksitas persoalan (Purwanto & Sutarna, 2021). Di satu sisi, penduduk lokal sangat bergantung pada kegiatan keagamaan serta dihadapkan pada potensi degradasi nilai-nilai agama dan spiritual yang disajikan dengan cara yang menyimpang (Rinjani et al., 2024). Hal tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan untuk lebih bijaksana dan partisipatif dalam pemilihan destinasi wisata, terutama yang berbasis agama dan kepercayaan (Harnish, 2021). Penting untuk memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta, untuk menciptakan keseimbangan antara produksi dan penggunaan (Khoirudin & Silviariza, 2025).

Fenomena di Pura Lingsar mencerminkan dinamika yang kompleks antara pelestarian nilai-nilai budaya dan desakan ekonomi dari sektor pariwisata (Watra et al., 2020). Sebagai situs religius yang unik karena merupakan tempat ibadah bagi umat Hindu dan penganut Islam Wetu Telu-Pura Lingsar, Pura Lingsar memiliki nilai kesakralan yang tinggi sekaligus menjadi simbol kerukunan antar umat beragama di Lombok. (Nensia et al., 2024).

Namun, dalam dua dekade terakhir, meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara telah memicu transformasi fungsi situs ini menjadi tujuan wisata budaya yang dikemas untuk konsumsi pasar (Kumbara, & Sutrisno, 2024). Pergeseran ini memunculkan hubungan antara nilai agama, identitas lokal, dan orientasi ekonomi yang dikonstruksi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal (Harnika et al., 2025).

Popularitas Pura Lingsar yang semakin meningkat sebagai objek wisata telah menimbulkan gejala komersialisasi dan komodifikasi budaya yang signifikan (Hamdiani et al., 2024). Ritual tradisional dan perayaan tahunan seperti perang topat, yang sebelumnya merupakan ekspresi spiritual dan budaya masyarakat (Aslamiah, et al., 2024), kini diadaptasi dengan penjadwalan ulang dan presentasi teatral untuk memenuhi ekspektasi wisatawan (Zidni et al., 2021).

Praktik ini sering kali melibatkan aktor-aktor di luar komunitas yang tidak memiliki pemahaman tentang konteks sakral dari acara tersebut (Hafifi et al., 2022), sehingga berpotensi mendegradasi makna asli dari upacara tersebut dan menciptakan bentuk representasi budaya yang menyimpang (Ningsih et al., 2023). Komodifikasi ini juga diperparah dengan pemasaran pariwisata berbasis eksotisme yang mengabaikan dimensi spiritualitas dan menjadikan budaya lokal sebagai komoditas visual semata (Kadri 2022).

Berdasarkan pengamatan peneliti menunjukkan adanya indikasi pada ketegangan antara pelestarian nilai sakral dan

dorongan komersial yang datang dari industri pariwisata dan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dan pelaku wisata sering kali memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata tanpa mekanisme pengawasan yang ketat terhadap aspek pelestarian budaya takbenda. Akibatnya, komunitas adat kerap berada dalam posisi pasif atau terpinggirkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan situs budaya. Ketidakseimbangan ini menciptakan ruang resistensi maupun kompromi dalam komunitas, terutama terkait kontrol atas narasi budaya, pemanfaatan ruang suci, dan distribusi manfaat ekonomi dari sektor pariwisata Pura Lingsar. Aspek legal-formal yang mengatur perlindungan situs sakral masih bersifat umum dan tidak secara eksplisit melindungi praktik budaya lokal dari eksploitasi komersial. Ketiadaan standar etika dalam pengelolaan destinasi berbasis budaya menyebabkan pengunjung tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang nilai-nilai sakral situs yang mereka kunjungi, dan pelaku wisata juga tidak memiliki panduan operasional dalam menyelaraskan kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, penelitian ini berupaya mengeksplorasi lebih dalam dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi bagaimana praktik sakralitas dan komersialisasi yang terjadi pada Pura Lingsar di tengah tekanan komersialisasi wisata budaya. Serta, untuk merumuskan model pengelolaan destinasi sakral berbasis kearifan sebagai alternatif terhadap pendekatan komodifikasi budaya dalam industri pariwisata.

Fokus kajian pada bagaimana aktor-aktor lokal termasuk tokoh adat, pemuka agama, pelaku wisata, dan pemerintah mendefinisikan, mempertahankan, dan menegosiasikan makna situs ini dalam konteks transformasi sosial-ekonomi yang dipicu oleh pariwisata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap wacana pariwisata budaya berkelanjutan serta memberikan rekomendasi

kebijakan yang kontekstual dan partisipatif bagi pengelolaan destinasi-destinasi sakral di Indonesia.

## **KAJIAN PUSTAKA Wisata Budaya**

Wisata budaya menurut (Andina & Aliyah, 2021) merupakan salah satu jenis wisata yang paling populer di negara Indonesia. Fakta menyatakan bahwa wisata budaya menjadi pilihan utama untuk wisatawan manca negara yang ingin mengetahui kebudayaan dan kesenian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat dan kehidupan seni budaya, tradisi yang beraneka ragam, dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari keadaan masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa (Erwen et al., n.d.). Berdasarkan artian tersebut, warisan budaya merupakan hasil budaya fisik (*tangible*) dan nilai budaya (*intangible*) dari masa lalu. Warisan budaya fisik (*tangible heritage*) sering diklasifikasikan menjadi warisan budaya tidak bergerak (*immovable heritage*) dan warisan budaya bergerak (*movable heritage*) (Dharmawan, et al., 2022).

Menurut (Cooper, 2018 dalam Tamitiadini et al., 2021) memandang wisata budaya sebagai perjalanan ke destinasi yang menawarkan pengalaman berbasis warisan budaya baik *tangible* (bangunan bersejarah, artefak, arsitektur) maupun *intangible* (ritual, bahasa, musik, kuliner). Asumsi yang bisa diuji dari kedua definisi ini adalah bahwa wisatawan selalu datang untuk belajar dan menghargai budaya. Padahal, kenyataannya sebagian wisatawan hanya mencari hiburan tanpa keterlibatan intelektual yang mendalam. Ini mengundang pertanyaan: apakah wisata budaya masih benar-benar “berbasis budaya” jika motivasi wisatawan lebih konsumtif ketimbang reflektif,

Menurut (Smith, 2009 dalam Rasyiddin & Kusnadi, 2024) mengelompokkan wisata budaya menjadi dua bentuk besar: *heritage tourism* dan *art tourism*. *Heritage tourism* berfokus pada situs sejarah, museum, cagar budaya,

monumen, dan peninggalan arkeologis, sementara *art tourism* berkaitan dengan pertunjukan seni, festival, pameran, hingga kerajinan tradisional. Sementara itu, (Gumilang et al., 2025) *heritage tourism, living culture tourism, dan contemporary cultural expression*, yang berarti wisata tidak hanya terbatas pada masa lalu tetapi juga budaya yang hidup dan terus berkembang (Lexhagen et al., 2023), pengelompokan ini membuka diskusi mengenai batasan: kapan sebuah kegiatan hiburan modern masih dapat disebut budaya, jika festival musik modern dikomersialisasi tetapi berakar pada tradisi lokal (Parmadi, 2021). Dengan memperhatikan definisi dan klasifikasi tersebut, kita tidak hanya menerima konsep wisata budaya begitu saja, tetapi juga melihat ruang kritis untuk mempertanyakan praktik dan orientasinya dalam kenyataan.

### **Sakralitas**

Menurut (Mircea Eliade dalam Yin et al., 2025) sakralitas dipahami sebagai realitas yang bersifat mutlak serta berada di luar jangkauan ruang profan. Dalam pandangannya, kesucian tidak melekat pada objek atau lokasi secara fisik, melainkan hadir sebagai wujud dari kekuatan adikodrati yang termanifestasi dalam dunia material. Manifestasi tersebut menjadikan ruang sakral berfungsi sebagai poros penghubung antara manusia dan dimensi metafisis.

Dari sisi ilmu sosial, kajian mengenai praktik ritual masyarakat adat menunjukkan bahwa sakralitas terbentuk melalui norma, pemisahan ruang suci dan profan, serta aktivitas keagamaan yang menjaga kohesi sosial dan nilai budaya. Dengan kata lain, sakralitas dapat dipahami bukan hanya sebagai konsep keagamaan, melainkan juga sistem simbolik yang menopang identitas kolektif, pengalaman spiritual, serta aturan sosial yang dihargai komunitas sebuah aspek yang melampaui sekadar fungsi material atau kepentingan praktis.

### **Komodifikasi**

Menurut (Afolabi et al., 2023) bahwa komodifikasi budaya dalam pariwisata dapat dipahami sebagai proses ketika warisan budaya mulai dari tradisi, kesenian, ritual,

hingga artefak diubah menjadi komoditas ekonomi yang dipasarkan sebagai produk wisata, sehingga nilai budaya tidak lagi berdiri murni pada fungsi sosial dan spiritual, tetapi dinilai berdasarkan daya jual dan nilai tukarnya dalam pasar pariwisata, kegiatan ritual sekaligus destinasi wisata budaya. Subjek penelitian meliputi pengelola pura, tokoh adat, pemandu wisata, pelaku usaha lokal, serta wisatawan yang berkunjung. Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik *purposive sampling* untuk memastikan bahwa responden memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait topik penelitian ini,

Maka, adapun jumlah informan pada penelitian ini berjumlah sebanyak 10 orang yang terdiri dari 2 orang pengelola Pura Lingsar, 2 orang dari tokoh adat setempat, 2 orang dari pihak dinas pariwisata dan dinas cagar budaya Lombok Barat serta 4 masyarakat lokal yang berada dan aktif dalam kegiatan budaya Pura Lingsar. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam penelitian ini, diharapkan mampu memotret interaksi dan persepsi yang beragam tentang keberadaan Pura Lingsar di tengah dinamika pariwisata.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali perspektif mendalam dari informan, sedangkan observasi dilakukan untuk memahami situasi, aktivitas, dan interaksi yang berlangsung di kawasan pura. Dokumentasi mencakup pengumpulan foto, brosur, dan catatan sejarah terkait Pura Lingsar. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan *member check* guna memastikan temuan penelitian akurat dan dapat dipercaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Sakralitas yang Terjadi di Tengah Tekanan Komersialisasi Wisata Budaya di Pura Lingsar**

Ketika ruang sakral seperti Pura Lingsar berhadapan dengan wisata budaya, yang muncul bukan sekadar interaksi biasa tetapi perjumpaan dua kerangka nilai yang berbeda dan sering kali berseberangan. Bagi masyarakat Hindu-Sasak, pura bukanlah objek visual, melainkan pusat spiritual yang berfungsi sebagai poros hubungan antara manusia, leluhur, dan kekuatan transenden. Namun, arus wisata budaya membawa perspektif baru yang didominasi logika pasar ketertarikan wisatawan pada ritus, arsitektur, dan simbol-simbol keagamaan melahirkan potensi pemanfaatan ekonomis. Situasi ini menimbulkan ruang negosiasi yang tidak dapat dihindari sakralitas harus dijaga, tetapi manfaat ekonomi juga menjadi hal yang menggoda. Maka, muncullah konsep kerja batas (*boundary work*), yakni pemisahan ketat antara area inti ritual yang dianggap suci dan wilayah yang masih dapat dipertunjukkan.

Di sinilah Pura Lingsar menjadi contoh bahwa wisata budaya bukan hanya konsumsi estetika, tetapi arena tawar-menawar nilai yang berlangsung terus-menerus. Ketegangan hadir, tetapi bukannya meruntuhkan kesakralan, ia justru memaksa komunitas adat memperjelas identitas mereka. Dengan demikian, wisata budaya dan sakralitas tidak serta merta bertentangan; keduanya dapat berjalan beriringan selama terdapat kontrol sosial yang kuat, kesadaran kolektif penjaga budaya, dan mekanisme adaptasi yang selektif terhadap intervensi ekonomi berbasis pariwisata.

Fenomena wisata budaya di Pura Lingsar menunjukkan bahwa proses komersialisasi tidak selalu merusak, selama bentuknya terkelola dan tidak menyentuh inti religius. Ritual Perang Topat misalnya, menjadi tontonan menarik bagi wisatawan namun tetap mempertahankan inti makna spiritualnya. Mengacu pada gagasan MacCannell mengenai *front region* dan *back region*, yang dipertontonkan kepada publik hanyalah lapisan luar upacara visual, simbolik, dan ritmis sedangkan proses terdalam seperti pembacaan mantra, pemanggilan leluhur, serta persiapan

spiritual tetap berada di ruang tertutup yang tidak untuk konsumsi wisatawan. Komodifikasi di sini bukan eksploitasi, melainkan seleksi bagian mana dari tradisi yang boleh dibagikan dan mana yang harus dijaga sebagai rahasia komunitas. Paradigma wisata budaya memerlukan performativitas agar dapat dinikmati, namun penjaga adat memastikan batas tersebut tidak dilanggar. Dengan cara itu, sakralitas tidak melebur ke dalam pasar, tetapi justru diperkuat karena garis pemisahannya menjadi semakin tegas. Ritual tidak kehilangan ruhnya, karena aspek yang dikomersialisasi hanyalah permukaan, bukan inti spiritual. Hal ini membuktikan bahwa wisata budaya dapat menjadi instrumen edukasi dan diplomasi identitas, tanpa menjadikan budaya sekadar produk jual beli. Kontrol makna, bukan penjualan makna, yang menjadi kunci keberlanjutan.

Keberhasilan menjaga kesakralan Pura Lingsar tidak pernah bersifat otomatis; ia terbangun melalui peran aktif para pemangku adat sebagai agen budaya. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin ritual, tetapi juga sebagai penjaga narasi dan filtrator informasi. Wisata budaya memberi peluang ekonomi, tetapi komunitas lokal tidak serta-merta menyerahkan semua aspek ritual sebagai komoditas. Mereka menetapkan aturan tegas menyangkut pakaian, gestur, akses ruang, hingga batas interaksi wisatawan.

Edukasi publik diberikan seperlunya wisatawan diperkenalkan pada makna simbolik pura, sejarah keagamaan, dan nilai toleransi Islam Sasak-Hindu Bali, namun dimensi esoterik hanya ditransmisikan kepada generasi penerus melalui proses pembelajaran tertutup. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sakralitas dipertahankan bukan dengan menolak wisata budaya, tetapi dengan memagari inti keagamaan dari penetrasi pasar.

Komersialisasi dapat hadir, tetapi hanya pada level yang tidak mengubah substansi ritual. Ketahanan budaya karena itu bukan warisan pasif, melainkan strategi adaptif masyarakat untuk mempertahankan identitas sambil memanfaatkan peluang

ekonomi. Di tengah tekanan globalisasi, model ini memperlihatkan bahwa pariwisata tidak harus menjadi ancaman, namun dapat berubah menjadi sarana regenerasi nilai asalkan kontrol berada pada tangan komunitas, bukan pengunjung.

Keberadaan wisatawan dan pasar global justru mendorong komunitas untuk semakin sadar akan warisan budayanya. Mengikuti pandangan Appadurai mengenai *production of locality*, kontak dengan dunia luar sering kali memicu upaya pembakuan identitas budaya yang lebih kuat. Ritual Perang Topat tidak hanya dipertahankan sebagai permohonan kesuburan, tetapi juga tampil sebagai simbol persaudaraan etnis dan agama di Lombok. Wisata budaya dalam konteks ini bukan sekadar tontonan, tetapi sarana pengakuan global yang memunculkan kebanggaan dan keterlibatan generasi muda. Komersialisasi memang hadir, namun fungsinya berubah menjadi katalis bagi revitalisasi tradisi, bukan erosi spiritual. Ketika publik luar menaruh rasa hormat dan kekaguman, komunitas terdorong untuk memperdalam makna leluhur dan memperbaiki tata kelola ritual.

Di sisi lain, tekanan pasar juga dapat menjadi alat refleksi internal: apakah tradisi masih memiliki relevansi? Apakah generasi muda mampu melanjutkan? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena adanya pengawasan eksternal. Wisata budaya di Pura Lingsar memperlihatkan hubungan siklikal antara sakralitas dan komersialisasi. Pariwisata menuntut performansi, namun performansi justru memperkuat identitas sakral jika dikelola dengan kesadaran dan kontrol komunitas.

Keseimbangan antara sakralitas dan komersialisasi menjadi mungkin karena pengelola membedakan dengan jelas dua tipe pengunjung: peziarah dan wisatawan. Peziarah datang mencari pengalaman transformatif, sedangkan wisatawan terutama ingin mengamati, mempelajari, atau menikmati budaya. Jika kedua tipe ini bercampur tanpa pengaturan, benturan nilai akan tak terhindarkan. Pura Lingsar menerapkan sistem ruang dan waktu untuk

meminimalkan gesekan. Wisatawan diarahkan melalui jalur tertentu, kunjungan dibatasi pada jam di luar prosesi ritus inti, serta terdapat instruksi etika yang wajib ditaati.

Wisata budaya tetap berjalan, namun tidak menghalangi alur ibadah. Pola ini menghasilkan dua mode pengalaman yang berdampingan pengalaman religius bagi umat, dan pengalaman kultural-visual bagi pengunjung umum. Komersialisasi boleh hadir dalam bentuk tiket, pemandu wisata, dokumentasi, atau aktivitas interaksi simbolik, tetapi sakralitas tetap menjadi pusat yang tidak dapat diganggu. Model dualitas ini memperlihatkan bahwa wisata budaya idealnya tidak menyeragamkan semua pengunjung. Perlu memperhatikan intensi spiritual dan intensi rekreatif secara berbeda. Dengan pengaturan tersebut, keberlanjutan ritual tetap terjaga sementara ekonomi lokal tetap bergerak. Wisatawan memperoleh pengetahuan, umat memperoleh kesunyian batin, dan adat memperoleh legitimasi sosial.



**Gambar 1.** Pintu Masuk Pura Lingsar

Agar hubungan antara wisata budaya dan sakralitas tetap harmonis, distribusi manfaat ekonomi harus transparan serta berpihak pada keberlanjutan tradisi. Pendapatan dari wisata seharusnya tidak hanya menjadi pemasukan desa, tetapi dialokasikan untuk perawatan situs, pembiayaan ritual, kesejahteraan pemangku, serta edukasi generasi muda mengenai warisan budaya. Dalam konteks

komersialisasi, etika menjadi fondasi yang mencegah budaya diperdagangkan secara vulgar. Wisata budaya bisa tumbuh pesat, tetapi tanpa kapasitas pengunjung yang terukur, situs sakral dapat mengalami degradasi fisik maupun spiritual.

Maka, diperlukan riset lanjutan mengenai *carrying capacity* Pura Lingsar, agar kunjungan wisata tidak melampaui daya dukung. Selain itu, kolaborasi antar aktor tokoh adat, pengelola wisata, pemerintah, dan komunitas harus dibangun dengan prinsip musyawarah. Wisata budaya yang tidak disertai mekanisme evaluasi hanya akan berakhir pada eksploitasi. Namun, jika pariwisata diarahkan secara partisipatif, ia dapat menjadi sumber penguatan tradisi. Sakralitas tetap terjaga, ekonomi tetap bergerak, dan budaya tetap hidup. Dengan demikian, komersialisasi bukan tujuan, melainkan alat untuk menopang keberlanjutan spiritual di tengah dinamika modern.

Manifestasi paling nyata dari resistensi kultural terhadap komersialisasi adalah penerapan kode etik dan pembatasan ruang yang tegas. Setiap pengunjung wajib mengenakan selendang adat sebagai syarat memasuki area semi-sakral. Aturan ini menegaskan bahwa budaya memiliki tata tertib yang tidak tunduk pada uang atau kuantitas wisata. Area inti seperti Kemaliq dikunci dan hanya terbuka bagi pemangku serta umat yang berkepentingan dalam ibadah ritual.

Pembatasan ini bukan bentuk eksklusivitas elit, tetapi mekanisme menjaga kesucian agar tidak terkontaminasi logika komoditas. Wisatawan memang memberi kontribusi ekonomi, tetapi mereka tidak otomatis memperoleh akses penuh. Sakralitas memiliki hierarki yang tidak dapat dinegosiasi. Wisata budaya yang berlangsung di zona luar justru memperlihatkan bahwa komunitas mampu mempatisi ruang dengan sangat presisi. Zona depan menjadi panggung interaksi budaya, sementara ruang batin tetap steril dari penetrasi komersial. Dengan cara itu, komodifikasi berubah menjadi strategi,

bukan ancaman. Pura Lingsar memperlihatkan bahwa pengelolaan ruang dapat menjadi benteng sakralitas yang efektif asalkan dijalankan secara konsisten dan disertai legitimasi sosial dari masyarakat adat sendiri.

Aspek pengetahuan sakral juga mengalami pengaturan serupa dengan ruang ritual. Informasi yang dapat diakses wisatawan dibatasi pada level simbolik dan moral, seperti pesan tentang kerukunan, keseimbangan kosmik, dan syukur terhadap alam. Namun, pengetahuan esoterik mantra, tahapan batin, bahasa ritual, hingga prosedur spiritual tidak pernah dipublikasikan meski wisata budaya berkembang. Mekanisme transmisinya bersifat vertikal dan internal, hanya untuk calon pemangku yang melalui proses asketis dan pembelajaran bertahun-tahun. Di sinilah terlihat bahwa komodifikasi tidak menyentuh inti epistemologi sakral.

Pengetahuan publik menjadi jembatan pariwisata, sedangkan pengetahuan suci menjadi fondasi eksistensi budaya. Model ini menyiratkan bahwa wisata budaya dan sakralitas dapat saling menopang tanpa melebur menjadi satu. Wisatawan memperoleh pengalaman kultural, ekonomi lokal tumbuh melalui jasa pemandu dan *event* ritual, sementara rahasia spiritual tetap terlindungi. Dengan demikian, komersialisasi di Pura Lingsar berlangsung secara selektif yang dijual adalah pengalaman luar, bukan inti kesucian. Inilah bentuk keseimbangan yang lahir bukan dari kompromi pasif, melainkan dari kontrol epistemik yang dilakukan komunitas agar tradisi tidak berubah menjadi semata-mata komoditas hiburan.

#### **Model Pengelolaan Destinasi Sakral Berbasis Kearifan sebagai Alternatif Terhadap Pendekatan Komodifikasi Budaya dalam Industri Pariwisata**

Pura Lingsar mencerminkan bentuk wisata budaya yang berkembang dari perpaduan antara nilai sejarah, tradisi ritual, serta warisan spiritual yang hidup dalam keseharian masyarakat Lombok. Dalam konteks penelitian ini, wisata budaya

dipahami bukan sekadar kegiatan berkunjung atau menikmati atraksi visual, namun sebuah proses interaksi antara wisatawan dengan struktur nilai yang mengatur ruang sakral, norma adat, hingga sistem kepercayaan yang menjadi identitas kolektif komunitas lokal.

Unsur budaya yang dihadirkan bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga sebagai pengetahuan yang ditransmisikan melalui narasi, simbol, dan ritus. Pura Lingsar, dengan keberadaan upacara Perang Topat, menjadi contoh bagaimana budaya direpresentasikan dalam dua bentuk ruang pengalaman. Ruang depan untuk apresiasi wisatawan dan ruang terdalam yang tidak dapat diakses oleh publik, agar kesakralan tetap terjaga.

Dengan demikian, wisata budaya di Pura Lingsar bukanlah praktik pasif, melainkan sebuah mekanisme kultural yang memungkinkan penonton menjadi pembelajar, komunitas menjadi pemilik narasi, dan situs suci tetap utuh dalam nilai. Konsep ini menempatkan budaya sebagai ruang hidup yang harus dihormati, diinterpretasi, dan dibaca melalui pengalaman langsung yang mendalam. Bukan sekadar diambil sebagai komoditas ekonomi bebas nilai sakralitas dalam konteks Pura Lingsar tidak hanya terletak pada bangunan fisik maupun ritual yang dilaksanakan, melainkan pada cara masyarakat adat menempatkan ruang ini sebagai pusat hubungan spiritual antara manusia, alam, dan entitas ilahi. Zona inti seperti Kemaliq dibatasi secara ketat sebagai manifestasi bahwa spiritualitas bukan komponen yang dapat didistribusikan secara komersial. Nilai-nilai sakral tersebut tetap dipertahankan walaupun wisata budaya berkembang pesat dan kunjungan wisatawan meningkat,

Di sinilah pengelolaan berbasis kearifan lokal bekerja komunitas tidak menolak hadirnya wisatawan, namun menyiapkan batas-batas pengalaman agar esensi agama tidak tereduksi menjadi tontonan. Wisatawan diperbolehkan mengamati prosesi tertentu, tetapi tidak

dapat mengganggu ritual inti yang bersifat esoterik. Pola ini menunjukkan bahwa sakralitas bukan konsep statis, melainkan memiliki mekanisme negosiasi kultural yang berfungsi mempertahankan martabat spiritual meskipun berada dalam tekanan pasar ekonomi. Dengan demikian, sakralitas di Pura Lingsar bekerja seperti sistem filtrasi. Apa yang dapat dilihat, apa yang dapat disentuh, dan apa yang tetap tersembunyi hanya untuk penganut kepercayaan. Model ini membangun kesadaran bahwa wisata budaya hanya dapat hidup apabila nilai spiritual yang melahirkannya tetap dipertahankan.

Masuknya wisatawan ke ruang Pura Lingsar membawa peluang ekonomi yang besar, tetapi juga risiko komodifikasi budaya apabila tidak dikelola secara hati-hati. Komersialisasi bukan sesuatu yang harus ditolak secara mutlak, sebab interaksi pasar dapat menghasilkan pemasukan bagi komunitas serta menjadi sumber pembiayaan pelestarian budaya. Tantangan terletak pada bagaimana komersialisasi dibingkai sehingga tidak menghapus makna ritual.

Strategi *cultural boundary* menjadi alat penting di mana ruang depan yang disebut *front stage* dijadikan arena tontonan untuk wisatawan, sementara ritual terdalam tetap eksklusif bagi pelaku adat. Model ini menciptakan zona aman, sehingga budaya tetap hidup dalam bentuk yang autentik, bukan didekonstruksi untuk kepuasan pasar. Dengan demikian, komersialisasi justru dapat menjadi alat pemelihara budaya apabila diarahkan melalui regulasi adat, sistem musyawarah, dan mekanisme pembatasan akses.



**Gambar 2.** Kawasan Suci Pura Lingsar

Pura Lingsar menunjukkan bahwa nilai ekonomi dan nilai spiritual tidak perlu berlawanan, selama mekanisme batas dikontrol komunitas dan bukan oleh pasar eksternal. Oleh karena itu, komersialisasi bukan akhir dari kesakralan, tetapi salah satu dimensi yang perlu diolah melalui kebijakan berbasis moral spiritual. Kearifan lokal menjadi dasar utama yang memungkinkan sakralitas dipertahankan meskipun destinasi ini berada dalam arus wisata global. Seperti konsep Tri Hita Karana di Bali atau Sasi di Maluku, masyarakat Lombok juga memiliki struktur nilai yang mengatur relasi antara komunitas, wisatawan, dan kesucian situs.

Nilai tersebut terwujud dalam mekanisme izin ritual, pembatasan akses ruang suci, serta pengelolaan dana hasil wisata yang diprioritaskan untuk konservasi. Model pengelolaan *bottom-up* menjadikan masyarakat bukan objek wisata, melainkan pemilik otoritas penuh atas ruang budaya. Dengan demikian, wisata budaya tidak hanya berlangsung secara pasif tetapi menjadi proses transfer nilai di mana pengetahuan adat direproduksi dan diwariskan.

Hal ini memperkuat identitas kolektif masyarakat yang sering melemah akibat pariwisata massal. Pura Lingsar menjadi bukti bahwa destinasi suci dapat beradaptasi tanpa kehilangan ruh keagamaannya, karena kearifan lokal menjadi instrumen moral yang

menunda eksploitasi berlebihan. Ketika komunitas memiliki kontrol penuh, komodifikasi tidak bertransformasi menjadi profanisasi, tetapi menjadi instrumen ekonomi beradab yang menghidupkan tradisi. Ini memperlihatkan bahwa wisata budaya hanya dapat berdiri kuat apabila diletakkan pada fondasi kearifan lokal yang hidup.

Penerapan konsep wisata budaya di Pura Lingsar menggeser paradigma kepariwisataan dari aktivitas konsumsi visual ke arah pengalaman interpretatif yang imersif. Wisatawan tidak sekadar datang untuk menyaksikan ritual, tetapi diarahkan untuk memahami makna filosofis di baliknya melalui penjelasan naratif dan pendampingan oleh pemandu lokal. Dengan demikian, pengalaman wisata tidak jatuh pada eksotisme dangkal atau komodifikasi agresif, melainkan berfungsi sebagai kegiatan pembelajaran budaya. Sistem ini juga bekerja sebagai filter nilai. Wisatawan yang datang tanpa niat menghormati sakralitas akan mengalami pembatasan akses, sedangkan mereka yang siap belajar memperoleh pengalaman spiritual yang lebih dalam.

Proses ini membangun kesadaran publik bahwa budaya sakral tidak dapat dinilai dari estetika semata, tetapi harus diapresiasi dari nilai historis dan spiritual yang melatarinya. Pura Lingsar menjadi ruang edukasi kultural di mana wisatawan belajar mengenai harmoni antara umat Hindu dan Islam Wetu Telu, simbol kesuburan dalam Perang Topat, serta struktur ritual yang tidak boleh dipertontonkan. Inilah bentuk wisata budaya yang tidak mengorbankan kesakralan demi hiburan, melainkan memperluas literasi kultural yang memperkuat penghormatan antar umat.

Peran komunitas lokal sangat menentukan arah pengelolaan wisata budaya di Pura Lingsar. Agensi budaya memungkinkan masyarakat memiliki kendali penuh atas narasi, mekanisme ritual, dan peraturan kunjungan wisatawan. Dengan struktur kelembagaan adat, komunitas

mampu menentukan kapasitas kunjungan, menetapkan larangan fotografi, membatasi akses ke ruang inti, serta mengelola pendapatan secara transparan.

Sistem ini mencegah dominasi investor luar yang cenderung mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan sakralitas situs. Distribusi manfaat yang adil melalui musyawarah juga memperkuat rasa kepemilikan kolektif dan mendorong generasi muda untuk tetap terlibat dalam ritual. Ketika komunitas menjadi aktor dominan, komodifikasi tidak bertransformasi menjadi eksploitasi, tetapi menjadi bagian dari strategi keberlanjutan ekonomi dan budaya. Pola pemberdayaan ini mencegah situs suci menjadi objek kapitalisasi sepihak, sebaliknya menghasilkan redistribusi manfaat yang menjaga martabat spiritual. Agensi komunitas adalah benteng terakhir yang menghubungkan wisata budaya dengan sakralitas, menjaga agar nilai ekonomi tidak menghapus makna religius yang diwarisi turun-temurun.

Model pengelolaan di Pura Lingsar menghadirkan hubungan simbiosis antara komersialisasi dan pelestarian budaya. Pendapatan dari tiket masuk, donasi, dan paket wisata dialokasikan untuk pemeliharaan pura, pendanaan upacara, serta program pemberdayaan ekonomi lokal. Aliran sumber daya yang berputar di dalam komunitas menjadikan kebudayaan tidak hanya bertahan, tetapi juga beregenerasi. Berbeda dengan wisata massal yang sering mengorbankan kesucian demi keuntungan instan, pola di Pura Lingsar menggunakan keuntungan untuk memperkuat struktur adat.

Dengan demikian, ekonomi menjadi pelindung budaya, bukan penghancurnya. Keberhasilan sistem ini terlihat dalam kontinuitas Perang Topat yang tetap berlangsung dengan penuh makna, bukan sekadar pertunjukan komersial. Wisatawan memperoleh pengalaman transformatif, komunitas memperoleh kesejahteraan, dan situs sakral tetap berdiri dalam ketenangannya. Inilah model wisata budaya yang sehat—nilai spiritual menjadi kompas, komersialisasi menjadi bahan bakar, dan

tradisi menjadi motor utama keberlanjutan. Ketika ketiganya terhubung secara seimbang, Pura Lingsar tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh sebagai ruang suci yang produktif secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Dari perspektif keberlanjutan jangka panjang, model pengelolaan berbasis kearifan lokal di Pura Lingsar dapat dijadikan rujukan nasional bagi destinasi sakral lain di Indonesia. Pola yang diterapkan menunjukkan bahwa wisata budaya dapat hidup tanpa mengorbankan nilai religius apabila komunitas diberi kendali penuh atas representasi budaya dan regulasi kunjungan. Konsep *boundaries*, komodifikasi terbatas, dan distribusi manfaat yang transparan menciptakan ketahanan budaya yang sulit digoyahkan pasar. Nilai sakral tidak dilebur menjadi produk, tetapi diberikan ruang untuk berfungsi sebagai sistem nilai yang terus diperbarui melalui ritual, pendidikan wisata, dan regenerasi adat. Jika model ini diadopsi pada destinasi suci lain seperti Tanah Lot, Borobudur, atau Wae Rebo, maka wisata budaya Indonesia dapat bergerak menuju arah yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan. Pura Lingsar mengajarkan bahwa komersialisasi bukan musuh sakralitas, tetapi kekuatan yang harus dikendalikan oleh moral spiritual dan hukum adat. Dengan demikian, keberlanjutan wisata tidak lagi bergantung pada kuantitas kunjungan, tetapi pada kualitas pengalaman dan kelestarian nilai yang diwariskan lintas generasi.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang komprehensif, dapat ditegaskan bahwa keberlanjutan destinasi sakral seperti Pura Lingsar di tengah arus komersialisasi tetapi bahkan berpotensi menjadi pemicu revitalisasi budaya melalui strategi yang memanfaatkan *agency* kultural masyarakat lokal. Keberhasilan tersebut lahir dari kemampuan komunitas dalam menegosiasikan ketegangan antara nilai spiritual dan tuntutan ekonomi melalui

praktik *boundary work* yang ketat, penerapan komodifikasi terbatas yang hanya menyoroti aspek permukaan (*front region*), serta mekanisme *cultural policing* yang meneguhkan otoritas adat. Menariknya, tekanan komersialisasi justru mendorong lahirnya bentuk lokalisitas baru yang memperkuat identitas kultural, sementara diferensiasi ruang dan pengalaman antara peziarah dan wisatawan tetap menjaga kesakralan ritual. Model pengelolaan berbasis kearifan lokal, seperti filosofi Tri Hita Karana, menawarkan kerangka kerja holistik yang mengubah budaya dari sekadar komoditas menjadi sebuah *living value system*, sekaligus melahirkan *cultural scarcity value* yang berkelanjutan. Agar tercipta simbiosis mutualistik yang berkesinambungan, diperlukan mekanisme distribusi manfaat yang transparan, penetapan daya dukung berbasis kajian ilmiah, serta penerapan *action research* partisipatif yang mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan. Limitasi penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian yang hanya berfokus pada Pura Lingsar sebagai satu-satunya lokasi observasi, sehingga dinamika sakralitas, komersialisasi, dan praktik wisata budaya yang ditemukan belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh destinasi serupa di Indonesia. Keterbatasan ini diperkuat oleh pendekatan kualitatif deskriptif yang memberikan kedalaman makna, namun belum mampu menyajikan pembuktian kuantitatif terkait dampak ekonomi, persepsi wisatawan secara statistik.

#### **Rekomendasi**

Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas objek kajian pada beberapa destinasi sakral dengan karakteristik wisata budaya yang berbeda, sehingga analisis dapat lebih komprehensif dan komparatif seperti dampak ekonomi, indeks keterlibatan masyarakat, atau kecenderungan motivasi wisatawan, agar kesimpulan yang dihasilkan lebih kuat secara metodologis. Integrasi perspektif etnografi jangka panjang atau *action research* juga dapat menjadi alternatif, guna menangkap proses negosiasi antara sakralitas dan

pariwisata secara lebih dinamis serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif bagi pengelolaan destinasi berbasis kearifan lokal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afolabi, O. O., Ojo, S. A., & Ayoola, O. P. (2024). Commoditization Of God In Religion: Marketing 'Pentecostalism' in The Nigerian Public Space. *Journal Of Pentecostal And Charismatic Christianity*, 44(2), 131-154. <https://doi.org/10.1080/27691616.2023.2279324>
- Andina, S. A., & Aliyah, I. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wisatawan Dalam Mengunjungi Wisata Budaya Candi Borobudur*. 22(3), 27–38.
- Anom Kumbara, A. A. N., & Sutrisno, N. (2024). Kontestasi Keberagamaan Umat Hindu Dan Islam Wetu Telu Di Pura Lingsar Lombok Barat. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 8(2), 157–170. <https://doi.org/10.37329/Jpah.V8i2.2725>
- Aryawati, N. M. C., Wirawan, I. W. A., & Wirata, I. W. (2022). Komunikasi Cultural Resource Management Perang Topat Di Pura Dan Kemaliq Lingsar. *Guna Sewaka*, 1(2), 23–34. <https://doi.org/10.53977/Jgs.V1i2.667>
- Budhawati, N. P. S. (2022). Strategi Melestarikan Kesakralan Pura Di Tengah Pengembangan Pariwisata Budaya Di Lombok. ... *Budaya Dan Keagamaan*, 1(1), 53–62.
- Chi, X., & Han, H. (2021). Emerging Rural Tourism In China's Current Tourism Industry And Tourist Behaviors: The Case Of Anji County. *Journal Of Travel And Tourism Marketing*, 38(1), 58–74. <https://doi.org/10.1080/10548408.2020.1862026>
- Erwen, I. V., Shielline, P., Poluan, R. C., Wangsa, V., Pratama, W., Widyawan,

- I., & Program, T. S. (N.D.). *CULTURAL COMMODIFICATION AND ITS IMPLICATION IN TOURISM: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*. 188–199.
- Fathoni, M., Dewi, N. P. S., & Azhari, M. (2023). Konvergensi Simbolik Muslim Dan Hindu Dalam Upacara Pujawali Dan Perang Topat. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 1–9. <https://doi.org/10.33084/Restorica.V9i2.5573>
- García-Villaverde, P. M., Ruiz-Ortega, M. J., Hurtado-Palomino, A., De La Gala-Velásquez, B., & Zirena-Bejarano, P. P. (2021). Social Capital And Innovativeness In Firms In Cultural Tourism Destinations: Divergent Contingent Factors. *Journal Of Destination Marketing And Management*, 19(December 2020). <https://doi.org/10.1016/J.Jdmm.2020.100529>
- Gumilang, M. A., Raihan, M., Azzahra, S., & Safira, N. (2025). *Pengalaman Gastronomi Dalam Praktik Sosial Masyarakat Adat: Studi Kasus Di Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi*. 7(2), 344–354.
- Harnish, D. (2021). Tolerance Of Ambiguity: Negotiating Religion And Sustaining The Lingsar Festival And Its Performing Arts In Lombok, Indonesia. *Religions*, 12(8). <https://doi.org/10.3390/Rel12080626>
- Hidayati, A. F., & Siregar, Y. A. (2024). Commodification Of Local Culture In The Development Of Wayang Villages Tourism. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 1(2), 176–191. <https://doi.org/10.30598/Baileofisipvol1iss2pp176-191>
- Khoirudin, R., & Silviariza, W. Y. (2025). *Menghidupkan Warisan Budaya: Pentas Kesenian Sebagai Magnet Wisata Candi Surowono Di Kediri*. 7(1), 80–93.
- Lexhagen, M., Ziakas, V., & Lundberg, C. (2023). *Popular Culture Tourism: Conceptual Foundations And State Of Play*. <https://doi.org/10.1177/00472875221140903>
- Matteucci, X., Koens, K., Calvi, L., & Moretti, S. (2022). Envisioning The Futures Of Cultural Tourism. *Futures*, 142(June 2021), 103013. <https://doi.org/10.1016/J.Futures.2022.103013>
- Nurhadi, I., Sumarti, T., Dharmawan, A. H., & Damanhuri, D. S. (2022). *An Insight From Osing Community, Indonesia Komodifikasi Budaya Dan Transisi Etik Dalam Perkembangan Pariwisata: Sorotan Kasus Pada Suku Osing, Indonesia*. 10(01), 24–43.
- Nurhadi, I., Sumarti, T., Hadi Dharmawan, A., & S Damanhuri, D. (2022). Cultural Commodification And Ethical Transition Of Tourism Development: A Case In Osing Community, Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(1), 24–43. <https://doi.org/10.22500/10202238564>
- Parmadi, B. (2021). *Lekesan: Interdisciplinary Journal Of Asia Pasific Arts Globalization Of Tourism Industry Toward Culture Of Local Wisdom In The Existance Of Pseudo Traditional Art Case Study Of The Commodification Of Bengkulu Traditional Arts*. 4(2), 102–109.
- Piramanayagam, S., Rathore, S., & Seal, P. P. (2020). Destination Image, Visitor Experience, And Behavioural Intention At Heritage Centre. *Anatolia*, 31(2), 211–228. <https://doi.org/10.1080/13032917.2020.1747234>
- Poort, M. E., Persson-Fischier, U., Martinsson-Wallin, H., Donaldson, E. E., & Schaub, M. (2021). Authenticity As A Pathway To Sustainable Cultural Tourism? The

- Cases Of Gotland And Rapa Nui. *Sustainability (Switzerland)*, 13(11), 1–14.  
<https://doi.org/10.3390/Su13116302>
- Purwanto, S. E., & Utama, I. W. (2021). Genealogical Acculturation Of Bali And Sasak Cultures In Lombok Island. *Humanus*, 20(1), 44.  
<https://doi.org/10.24036/Humanus.V20i1.111950>
- Queen Rinjani, Reinasha Cahya Anindy, & Ika Wijayanti. (2024). Peran Modal Sosial Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Pada Tradisi Perang Topat Di Pura Lingsar, Lombok Barat. *NAWASENA: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 3(2), 24–32.  
<https://doi.org/10.56910/Nawasena.V3i2.1579>
- Rasoolimanesh, S. M., Seyfi, S., Rather, R. A., & Hall, C. M. (2022). Investigating The Mediating Role Of Visitor Satisfaction In The Relationship Between Memorable Tourism Experiences And Behavioral Intentions In Heritage Tourism Context. *Tourism Review*, 77(2), 687–709.  
<https://doi.org/10.1108/TR-02-2021-0086>
- Rasyiddin, A., & Kusnadi, I. H. (2024). *Exploration Analysis Of The Impact Of Local Cultural Empowerment On Commercialization And Promotion Of Tourism Objects*. 4, 7352–7360.
- Rudiarta, I. W., Sari, P. P., & Ariani, N. W. (2022). Menangkal Desakralisasi Destinasi Wisata Pura Melalui Revitalisasi Ajaran Pendidikan Agama Hindu. *Cultoure: Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu*, 3(1), 50.  
<https://doi.org/10.55115/Cultoure.V3i1.2042>
- Suartana, I. N. (2022). Upacara Perang Topat Di Pura Lingsar Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Teologi Hindu). *Widyalya: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1), 81–103.
- Szromek, A. R., Herman, K., & Naramski, M. (2021). Sustainable Development Of Industrial Heritage Tourism – A Case Study Of The Industrial Monuments Route In Poland. *Tourism Management*, 83(November 2020), 104252.  
<https://doi.org/10.1016/J.Tourman.2020.104252>
- Tamitiadini, D., Dwi, R., Hapsari, V., & Hussein, A. S. (2021). *Destination Branding: Perceived Sacredness And Spiritual Tourism In Indonesia Amid The COVID-19 Pandemic*. 2021, 437–449.  
<https://doi.org/10.18502/Kss.V5i8.9396>
- Terkenli, T. S., & Georgoula, V. (2022). Tourism And Cultural Sustainability: Views And Prospects From Cyclades, Greece. *Sustainability (Switzerland)*, 14(1).  
<https://doi.org/10.3390/Su14010307>
- Tolkach, D., & Pratt, S. (2021). Globalisation And Cultural Change In Pacific Island Countries: The Role Of Tourism. *Tourism Geographies*, 23(3), 371–396.  
<https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1625071>
- Watra, I. W., Suda, I. K., Indiani, N. M., Suarda, I. W., Yuliana, E. D., Paramartha, W., & Suryasa, W. (2020). Adaptation Between Hindu And Islam Wetu Telu On Pura Lingsar Area In West Lombok. *Talent Development & Excellence*, 12(2), 746–767.
- Wei, Y., Liu, H., & Park, K. S. (2021). Examining The Structural Relationships Among Heritage Proximity, Perceived Impacts, Attitude And Residents' Support In Intangible Cultural Heritage Tourism. *Sustainability (Switzerland)*, 13(15).  
<https://doi.org/10.3390/Su13158358>
- Yin, S., Aboo, K., Khalid, T., & Hamzah, S. A. (2025). Asia And The Global Economy Commercializing Culture In China: The Reconstruction Of

Cultural Symbols And The Adaptation Of The Torch Festival. *Asia And The Global Economy*, 5(2), 100125.

<https://doi.org/10.1016/j.aglobe.2025.100125>

Zhang, T., Yin, P., & Peng, Y. (2021). Effect Of Commercialization On Tourists' Perceived Authenticity And Satisfaction In The Cultural Heritage Tourism Context: Case Study Of Langzhong Ancient City. *Sustainability (Switzerland)*, 13(12). <https://doi.org/10.3390/su13126847>

### **BIODATA PENULIS**

Rizki Sumardani, S.Par., M.Par. memulai karier sebagai praktisi di industri perhotelan hingga tahun 2022. Pada tahun yang sama, ia memulai perjalanan akademiknya sebagai dosen dan aktif mengembangkan kompetensi serta kontribusi di bidang pariwisata

Dr. Anak Agung Ayu Ribeka Martha Purwahita, S.E., M.Par. Anak Agung Ayu Ribeka Martha Purwahita merupakan dosen di Politeknik Negeri Bali. Ia meraih gelar Sarjana Pariwisata Tahun 2003. Kemudian memperoleh gelar Magister Pariwisata di Universitas Udayana pada tahun 2013 dan meraih gelar Doktor di Universitas Udayana pada tahun 2024.

Dr. I Wayan Kartimin, S.S., M.Par. Dosen pada Universitas Triatma Mulya. Aktif di organisasi sebagai Ketua Ikatan Alumni Magister Pariwisata (IKAYANA PAR) dan Pengurus Pusat IKAYANA Universitas Udayana Bali.

I Made Weda Satia Negara, SST.Par., M.Par meniti karir di industri perhotelan, saat ini ia merupakan seorang dosen tetap pada Program Studi Usaha Perjalanan Wisata di Politeknik Nasional.